



Penguatan Transparansi Dana BOS sebagai Praktik Pendidikan Kewarganegaraan di SD Eka Tjipta 01 Telen

Ayu Rahmawati ✉¹, Sulton ✉²

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel : Diterima Mei Revisi Juni Dipublikasikan Juli	Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan normatif tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga berfungsi menanamkan nilai moral, tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran terhadap kepentingan publik melalui praktik nyata dalam kehidupan sekolah. Salah satu praktik kelembagaan yang relevan dengan nilai-nilai kewarganegaraan adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai dana publik yang bersumber dari negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan transparansi pengelolaan dana BOS sebagai praktik PPKn dan pendidikan moral di SD Eka Tjipta 01 Telen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru, serta studi dokumentasi terhadap RKAS dan laporan penggunaan dana BOS. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Eka Tjipta 01 Telen telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencerminkan upaya membangun akuntabilitas publik. Praktik transparansi yang diterapkan berkontribusi dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan sebagai bagian dari pembelajaran kewarganegaraan. Namun demikian, partisipasi warga sekolah dalam memaknai pengelolaan dana BOS sebagai sarana pembelajaran PPKn masih perlu diperkuat agar internalisasi nilai kewarganegaraan dapat berlangsung secara lebih optimal.
Keywords : Kewarganegaraan Transparansi BOS Akuntabilitas publik Pendidikan moral	ABSTRACT <i>Strengthening the Transparency of BOS Funds as a Civic Education Practice at SD Eka Tjipta 01 Telen.</i> Civics education is not merely oriented toward normative knowledge of citizens' rights and obligations, but also functions to instill moral values, responsibility, honesty, and public awareness through concrete practices in school life. One institutional practice closely related to civic values is the management of School Operational Assistance (BOS) funds as public funds provided by the state. This study aims to analyze the strengthening of transparency in BOS fund management as a practice of Civics Education and moral education at SD Eka Tjipta 01 Telen. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with the principal, BOS treasurer, and teachers, as well as documentation studies of the School Activity and Budget Plan (RKAS) and BOS financial reports. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that BOS fund management at SD Eka Tjipta 01 Telen has been implemented in accordance with applicable regulations and demonstrates a commitment to building public accountability. The transparency practices applied contribute to fostering honesty, responsibility, and openness as core values of civic education. However, the participation of school stakeholders in interpreting BOS fund management as a learning medium for Civics Education still requires further strengthening to ensure optimal internalization of civic values.
How to Cite : Rahmawati, A. & Sulton (2026). Penguatan Transparansi Dana BOS sebagai Praktik Pendidikan Kewarganegaraan di SD Eka Tjipta 01 Telen. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , 11 Special Issue (2), pp. 247-254.	

✉ **Alamat korespondensi:**

Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo^{1,2}

✉ **E-mail:**

ayurahmawati.pedagogi@gmail.com¹; sulton@umpo.ac.id²

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran moral terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Silitonga dkk., 2025). Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diarahkan untuk memahami posisi dan perannya sebagai bagian dari bangsa dan negara, sekaligus menyadari pentingnya nilai kebersamaan, keadilan, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana strategis untuk menyiapkan generasi muda agar mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk, menjunjung nilai demokrasi, serta menghormati kepentingan publik dalam setiap tindakan yang dilakukan (Labetubun dkk., 2022).

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diarahkan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan mengenai sistem kenegaraan, nilai-nilai Pancasila, dan konstitusi, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan beretika dalam kehidupan sosial (Mubaraq & Faslah, 2025). Dalam konteks masyarakat demokratis, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana penting untuk menyiapkan generasi muda agar mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan publik, mengambil keputusan secara etis, serta menghormati nilai keadilan, kebersamaan, dan kepentingan umum. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi kognitif, afektif, dan perilaku yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Lebih jauh, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada penguasaan konsep normatif mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak dan kewajiban warga negara (Sukmawati & Syudirman, 2023). Pendidikan kewarganegaraan juga menekankan pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku kewargaan yang tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus mampu mendorong peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai

kewarganegaraan dalam tindakan nyata (Pitoewas dkk., 2021). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu dipahami sebagai proses pendidikan yang bersifat holistik, integratif, dan kontekstual.

Sebagai proses yang holistik dan kontekstual, pendidikan kewarganegaraan berlangsung secara berkelanjutan melalui berbagai pengalaman belajar yang dialami peserta didik (Setiawan dkk., 2022). Pengalaman tersebut tidak hanya terjadi di ruang kelas melalui kegiatan pembelajaran formal, tetapi juga terwujud dalam praktik sosial, interaksi antarwarga sekolah, serta budaya organisasi yang hidup dan berkembang di lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah memiliki peran penting sebagai ruang pembelajaran kewarganegaraan yang nyata, tempat peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dan keteladanan.

Dalam perspektif pendidikan, sekolah memiliki peran yang sangat strategis sebagai wahana utama pembentukan karakter kewarganegaraan peserta didik (Ali dkk., 2025). Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transfer pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya proses internalisasi nilai, pembentukan sikap, dan pengembangan perilaku sosial warga sekolah. Melalui berbagai aktivitas kelembagaan, kebijakan sekolah, serta pola hubungan antarwarga sekolah, peserta didik memperoleh pengalaman konkret mengenai bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan diterapkan dalam kehidupan bersama.

Sekolah menjadi laboratorium sosial tempat pendidikan kewarganegaraan dipraktikkan secara nyata. Di dalam lingkungan sekolah, peserta didik belajar tentang aturan, tanggung jawab, kerja sama, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama (Maresi & Basoeki, 2024). Pengalaman-pengalaman tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan peserta didik, karena nilai-nilai tidak hanya diajarkan, tetapi juga dialami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Lingkungan sekolah yang dikelola secara transparan, partisipatif, dan akuntabel akan memberikan pengalaman

kewarganegaraan yang bermakna bagi seluruh warga sekolah (Wahidin & Devi, 2024). Dalam lingkungan seperti ini, guru dan tenaga kependidikan tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan melalui tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil dalam kehidupan kelembagaan sekolah.

Salah satu aspek penting dalam kehidupan kelembagaan sekolah yang memiliki keterkaitan langsung dengan nilai-nilai kewarganegaraan adalah pengelolaan dana publik di sekolah, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan dana yang bersumber dari pemerintah dan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar (Narek dkk., 2026). Oleh karena itu, pengelolaan dana BOS tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga mengandung dimensi moral, etika, dan kewarganegaraan yang melekat sebagai dana publik.

Sebagai dana publik, penggunaan dana BOS menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana negara kepada masyarakat (Rachman dkk., 2022). Setiap keputusan terkait penggunaan dana BOS mencerminkan sikap dan nilai yang dianut oleh pengelola sekolah (Kemendikbud, 2021). Dalam konteks ini, pengelolaan dana BOS menjadi cerminan praktik kewarganegaraan yang berlangsung di lingkungan sekolah.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel dapat dipandang sebagai bentuk praktik kewarganegaraan dalam kehidupan sekolah (Sartika dkk., 2025). Melalui praktik tersebut, sekolah menunjukkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab publik diterapkan dalam pengelolaan sumber daya bersama. Guru dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam mengelola dana publik (Abdillah dkk., 2025).

Sementara itu, peserta didik dapat memperoleh pembelajaran kewarganegaraan secara tidak langsung melalui keteladanan dan budaya sekolah yang ditampilkan (Utami dkk., 2022). Peserta didik belajar memahami nilai-nilai kewarganegaraan bukan hanya dari materi pembelajaran, tetapi juga dari praktik nyata yang

mereka amati dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS berpotensi menjadi media pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual dan bermakna.

Dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan, sekolah dipahami sebagai sebuah organisasi sosial yang di dalamnya terdapat interaksi yang kompleks antara struktur organisasi, budaya sekolah, nilai-nilai yang dianut, serta kepemimpinan (Hoy & Miskel, 2013). Praktik pengelolaan keuangan sekolah, termasuk pengelolaan dana BOS, sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi yang berkembang (Abas & Ngiu, 2022). Kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan integritas akan mendorong terciptanya budaya sekolah yang sehat dan berorientasi pada nilai moral serta kepentingan publik.

Sergiovanni (2007) menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas manajerial dan pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kepemimpinan moral yang menempatkan nilai, etika, dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam pengelolaan sekolah. Dalam konteks ini, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai manajer administratif, tetapi juga sebagai pemimpin moral yang memberikan teladan dalam penerapan nilai-nilai kewarganegaraan melalui kebijakan dan praktik kelembagaan sekolah (Soro dkk., 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan dana BOS di sekolah sering kali dipahami secara terbatas sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku (Rusadi dkk., 2025). Fokus pengelolaan dana BOS sering kali terpusat pada pemenuhan aspek teknis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, sementara dimensi edukatif dan nilai kewarganegaraan yang terkandung di dalamnya kurang mendapatkan perhatian. Pemahaman yang semata-mata administratif ini berpotensi mengabaikan peran strategis pengelolaan dana BOS sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual.

Padahal, apabila dimaknai secara lebih luas, pengelolaan dana BOS memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai wahana pembelajaran kewarganegaraan yang konkret dalam kehidupan sekolah. Melalui keterbukaan informasi, partisipasi warga sekolah, dan

akuntabilitas penggunaan dana, sekolah dapat menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung operasional sekolah, tetapi juga sebagai media pembelajaran nilai moral, tanggung jawab publik, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama (Elita dkk., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan transparansi dana BOS agar pengelolaannya tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulatif, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan nilai kewarganegaraan dan pendidikan moral di lingkungan sekolah. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS dapat menjadi pintu masuk bagi sekolah untuk mengembangkan budaya keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan bersama. Upaya ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya pembentukan warga negara yang berintegritas dan bertanggung jawab.

SD Eka Tjipta 01 Telen merupakan salah satu sekolah dasar penerima dana BOS yang telah melaksanakan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah ini memiliki potensi untuk mengembangkan praktik pengelolaan dana BOS sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual. Melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap kepentingan publik kepada seluruh warga sekolah (Pemerintah Pusat, 2003). Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas, tetapi juga sebagai warga negara yang terlibat langsung dalam praktik pengelolaan dana publik, sementara siswa memperoleh pembelajaran nilai kewarganegaraan secara tidak langsung melalui budaya sekolah yang ditampilkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penguatan transparansi pengelolaan dana BOS sebagai praktik pendidikan kewarganegaraan di SD Eka Tjipta 01 Telen. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik pengelolaan dana publik di sekolah dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks pendidikan dasar dan manajemen sekolah yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaknaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai praktik nyata Pendidikan Kewarganegaraan yang berfungsi menanamkan nilai moral, tanggung jawab publik, dan akuntabilitas dalam kehidupan sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai fenomena sosial dan edukatif yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan dan moral. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan pengkajian yang kontekstual dan komprehensif terhadap praktik transparansi dana BOS dalam kehidupan sekolah.

Penelitian dilaksanakan di SD Eka Tjipta 01 Telen, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sekolah dipilih secara purposive dengan pertimbangan sebagai penerima dana BOS dan memiliki karakteristik yang relevan untuk dikaji dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru yang terlibat dalam pengelolaan serta pemanfaatan dana BOS.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik pengelolaan dana BOS dan interaksi warga sekolah. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman dan pengalaman informan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah RKAS, laporan penggunaan dana BOS, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Miles dkk., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui rangkaian kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Eka Tjipta 01 Telen. Proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana praktik pengelolaan dana BOS dilaksanakan dalam kehidupan sekolah sehari-hari serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara cermat untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan, sehingga temuan penelitian disajikan secara deskriptif tanpa memberikan penilaian normatif yang berlebihan, melainkan berfokus pada pemaknaan empiris terhadap praktik yang berlangsung di sekolah.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SD Eka Tjipta 01 Telen

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan telaah terhadap dokumen perencanaan sekolah, pengelolaan dana BOS di SD Eka Tjipta 01 Telen dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang terstruktur dan berkesinambungan. Tahap perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional sekolah serta program pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKAS dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan sekolah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, pemenuhan sarana dan prasarana, serta kegiatan pendukung lainnya yang relevan dengan proses pendidikan.

Dokumen RKAS yang dianalisis menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan dana BOS telah dirancang secara sistematis dan terarah. Setiap komponen anggaran dicantumkan secara rinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi jenis kegiatan maupun besaran anggaran yang dialokasikan. Perencanaan yang tertata ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana BOS berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan yang

jelas juga memudahkan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS.

Pada tahap pelaksanaan, dana BOS digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah, termasuk pengadaan alat dan bahan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan operasional lainnya yang menunjang proses pendidikan. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS diarahkan untuk memenuhi kebutuhan riil sekolah dan mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan penggunaan dana dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya, sehingga penggunaan dana dapat dikontrol dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sekolah.

Tahap pelaporan merupakan bagian akhir dari rangkaian pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana publik yang diterima sekolah. Sekolah menyusun laporan penggunaan dana BOS berdasarkan bukti-bukti penggunaan dana yang terdokumentasi dengan baik dan disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa laporan penggunaan dana BOS disusun secara sistematis dan mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana. Pelaporan yang tertib ini menunjukkan adanya upaya sekolah untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Praktik Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Eka Tjipta 01 Telen telah menerapkan praktik transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai penggunaan dana BOS kepada pihak-pihak terkait di lingkungan sekolah. Informasi tersebut disampaikan melalui forum internal sekolah, seperti rapat, serta melalui dokumen-dokumen administrasi yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Praktik ini menunjukkan adanya upaya sekolah untuk membuka akses informasi terkait pengelolaan dana publik.

Wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara BOS menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga keterbukaan informasi terkait penggunaan dana BOS. Keterbukaan ini

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan warga sekolah terhadap pengelolaan dana publik serta menciptakan suasana kerja yang transparan dan akuntabel. Praktik transparansi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya tanggung jawab dalam mengelola dana yang bersumber dari pemerintah.

Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan dan pemahaman warga sekolah terhadap pengelolaan dana BOS masih bervariasi. Sebagian guru telah memahami secara cukup rinci mengenai mekanisme penggunaan dana BOS, sementara sebagian lainnya hanya memahami secara umum tanpa terlibat langsung dalam proses perencanaan dan evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik transparansi telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar dapat melibatkan partisipasi warga sekolah secara lebih luas dan merata.

Dalam konteks ini, transparansi dana BOS tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga sebagai proses pembelajaran kolektif mengenai pengelolaan dana publik. Praktik keterbukaan yang dilakukan sekolah memberikan pengalaman nyata tentang bagaimana prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab diterapkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dengan demikian, transparansi menjadi bagian dari budaya sekolah yang berkontribusi terhadap pembentukan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan.

Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana BOS di SD Eka Tjipta 01 Telen. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil keputusan utama, pengawas pelaksanaan penggunaan dana, serta penanggung jawab akhir atas pengelolaan dana BOS. Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah memastikan bahwa setiap penggunaan dana BOS sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Peran kepemimpinan kepala sekolah tercermin dalam upaya menjaga keteraturan administrasi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah juga berperan dalam mengoordinasikan pihak-pihak

yang terlibat dalam pengelolaan dana, termasuk bendahara dan guru. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS berjalan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik di lingkungan sekolah.

Guru berperan sebagai pihak yang memanfaatkan dana BOS dalam kegiatan pembelajaran. Dana BOS digunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Meskipun guru tidak seluruhnya terlibat dalam aspek teknis pengelolaan dana, keterlibatan guru dalam pemanfaatan dana BOS memberikan pengalaman praktis mengenai penggunaan dana publik untuk kepentingan pendidikan (Effendy, 2018).

Temuan ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pendidik di ruang kelas, tetapi juga sebagai bagian dari warga sekolah yang terlibat dalam praktik pengelolaan dana publik. Pengalaman tersebut memiliki potensi untuk memperkuat pemahaman guru mengenai nilai tanggung jawab dan akuntabilitas sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

Implikasi Pengelolaan Dana BOS bagi Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun siswa tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana BOS, mereka memperoleh dampak tidak langsung dari praktik pengelolaan dana tersebut. Dana BOS berkontribusi terhadap penyediaan sarana pembelajaran, fasilitas sekolah, serta kegiatan pendukung yang menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Kondisi ini mendukung kelancaran proses pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa.

Selain dampak material, pengelolaan dana BOS juga memberikan implikasi nilai bagi siswa melalui budaya sekolah yang dibangun. Praktik keterbukaan dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh pihak sekolah menjadi contoh nyata bagi siswa mengenai bagaimana sumber daya publik dikelola secara bertanggung jawab. Melalui pengalaman sehari-hari di lingkungan sekolah, siswa belajar mengenai nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab melalui

keteladanan yang ditampilkan oleh guru dan pengelola sekolah.

Dengan demikian, pengelolaan dana BOS di SD Eka Tjipta 01 Telen tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan operasional sekolah, tetapi juga memiliki implikasi edukatif yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan dan moral siswa. Budaya sekolah yang menekankan transparansi dan akuntabilitas menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi siswa dalam memahami nilai-nilai kewarganegaraan secara tidak langsung.

Untuk menegaskan keterkaitan antara temuan empiris tersebut dengan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian selanjutnya disintesis secara analitik sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Temuan Pengelolaan BOS dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Fokus Temuan	Praktik Pengelolaan Dana BOS	Nilai Pendidikan Kewarganegaraan
Perencanaan keuangan sekolah	Penyusunan RKAS berdasarkan kebutuhan dan prioritas sekolah	Tanggung jawab terhadap kepentingan publik
Pelaksanaan penggunaan dana	Pemanfaatan dana untuk kegiatan pembelajaran dan operasional	Kepedulian terhadap kepentingan bersama
Transparansi pengelolaan	Penyampaian informasi penggunaan dana kepada warga sekolah	Kejujuran dan keterbukaan
Kepemimpinan sekolah	Peran kepala sekolah dalam pengawasan dan pengambilan keputusan	Keteladanan dan akuntabilitas
Peran guru dan dampak bagi siswa	Pemanfaatan fasilitas pembelajaran dan pembentukan	Internalisasi nilai kewarganegaraan dan moral

budaya
sekolah

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1, dapat dipahami bahwa pengelolaan dana BOS di SD Eka Tjipta 01 Telen tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga mengandung dimensi edukatif yang relevan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Keterkaitan antara praktik perencanaan, pelaksanaan, transparansi, serta peran kepemimpinan dan guru menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS berpotensi menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi warga sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan akuntabilitas dapat terinternalisasi melalui praktik pengelolaan dana publik di lingkungan sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Eka Tjipta 01 Telen telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik pengelolaan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga menunjukkan adanya upaya menjaga keteraturan administrasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik secara sistematis.

Praktik transparansi dalam pengelolaan dana BOS yang diterapkan di sekolah tercermin melalui keterbukaan informasi kepada warga sekolah serta penyusunan laporan penggunaan dana secara berkala. Keterbukaan ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan internal dan menciptakan iklim pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Meskipun tingkat pemahaman dan keterlibatan warga sekolah masih beragam, praktik transparansi yang berjalan telah menjadi fondasi penting bagi penguatan budaya akuntabilitas di lingkungan sekolah.

Peran kepala sekolah dan guru terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam memastikan pengelolaan dana BOS berjalan sesuai perencanaan. Kepemimpinan kepala sekolah dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, serta peran guru dalam pemanfaatan dana untuk kegiatan pembelajaran, menunjukkan adanya sinergi antarwarga sekolah

dalam mengelola sumber daya publik. Kondisi ini mencerminkan praktik kepemimpinan dan partisipasi yang sejalan dengan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan.

Implikasi pengelolaan dana BOS tidak hanya dirasakan pada aspek administratif dan fasilitas pembelajaran, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan dan moral siswa. Melalui budaya sekolah yang menekankan keterbukaan, tanggung jawab, dan keteladanan, siswa memperoleh pengalaman belajar kontekstual mengenai pengelolaan sumber daya publik secara tidak langsung. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS di SD Eka Tjipta 01 Telen memiliki potensi sebagai sarana penguatan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral dalam kehidupan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, & Ngiu, S. Q. B. Z. (2022). Inovasi Kepala Sekolah Dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Multikasus Di Sma Negeri 1 Marisa Dan Smk Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo). *Jurnal Normalita*, 10(3), 162–180.
<https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/JN/article/view/1796>
- Abdillah, D. P. S., Soekarno, G. A., Anasari, T., Sulistiyowati, N. A., Harsono, & Suyatmini. (2025). Peran Sumber Daya Manusia dalam Strategi Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 6727–6733.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4827>
- Ali, M., As, J., Abid, M., & Silalahi, R. H. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Pelajar Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(1), 32–38.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v15i1.22638>
- Effendy, M. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2018 tentang BOS*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. <http://repositori.kemendikdasmen.go.id/id/eprint/5284>
- Elita, E., Inovasi, J., Mirdad, A., Muslihat, E., Suryana, T., Nusantara, I. M., Lio, J., Sirnagalih, B., Sukabumi, K., & Barat, J. (2025). Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap Kualitas Pendidikan di SMP PGRI 1 CIAMBAR Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen . dalam Permendiknas No . 41 Tahun 2007 , yang menyebutkan berbagai komponen pembiayaan. *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(4), 85–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i4.2255>
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013). *Educational administration : theory research and practice* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20130715&lokalasi=lokal>
- Kemendikbud. (2021). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. <https://bosp.kemendikdasmen.go.id/news/view/petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bos-reguler-13287a0f-6c0f-43c7-b78b-693d471a9b11>
- Labetubun, M. A. H., Titahelu, J. A. S., Mardiana, Ramadhan, M. S., Holle, E. S., Simbolon, N. Y., Primawati, N. H., Rahman, A., Pidada, I. B. A., Herniwati, Jahri, M., & Mahardhani, A. J. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan* (A. Masruroh (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/409034/pendidikan-kewarganegaraan-sebagai-pembangunan-karakter-bangsa#cite>
- Maresi, S. R. P., & Basoeki, A. D. (2024). Upaya meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap keberlangsungan lingkungan. *JOCAE: Journal of Character and Environment*, 1(2), 113–125.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61511/jocae.v1i1.2024.474https://doi.org/10.61511/jocae.v1i1.2024.474>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ>
- Mubaraq, R., & Faslah, R. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai mengembangkan pemikiran politik mahasiswa. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 747–752.

- Narek, M. A. D., Kase, P., & Mau, A. O. E. (2026). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 533–546. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimak.v5i1.5755>
- Pemerintah Pusat. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Pitoewas, B., Mona, M., Prawisudawati, E., Rohman, Hartino, A. T., & Rhosita. (2021). Signifikansi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Memaksimalkan Kompetensi Warga Negara. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 437–446. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/dedive.v1i12.508>
- Rachman, D., Setiawan, D., Maftuh, R., Nugraha, T., Ekonomi, F., Bale, U., Keuangan, P., & Sekolah, B. O. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sma Sasama. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 13(3), 73–86. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/1064>
- Rusadi, Affrian, R., & Riadi, S. (2025). Pengelolaan bantuan operasional sekolah (bos) pada madrasah tsanawiyah nurul hidayah kecamatan amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara. *MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(2), 840–849. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/1478>
- Sartika, D., Masduki, & Rochimah, H. (2025). Akuntabilitas transparansi pengelolaan bos dalam optimalisasi mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 697–707. <https://doi.org/https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.632>
- Sergiovanni, T. J. (2007). *Rethinking leadership: A collection of articles*. Corwin Press. https://books.google.co.id/books?id=j_uz9xdmLtUC
- Setiawan, D., Jamaludin, Rachman, F., & Halking. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perspektif Kearifan Lokal Berwawasan Global* (Jamaludin & H. Syahputra (eds.)). CV. Format Publishing. <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/52695>
- Silitonga, K. T., Arini, D., Marsoit, S., Br, M. C., & Yunita, S. (2025). Membangun Warga Negara Ideal: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Indonesia. *Indonesian Journal of Learning Studies*, 5(2), 85–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.53769/ijls.v5i2.1628>
- Soro, S. H., Kurniati, N., Henri, R., & Nasyanawati, N. (2024). Esensialitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di SDN 216 Sondariah). *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 2147–2154. <https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1213>
- Sukmawati, A., & Syudirman. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan* (M. L. Irrubai (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Egaliter.
- Utami, E. P., Bahrudin, F. A., & Legiani, W. H. (2022). Penanaman kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap siswa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 49–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2076>
- Wahidin, D., & Devi, L. S. (2024). Penguatan Kepedulian Lingkungan Sekolah Melalui Kegiatan Ecological Citizenship. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(10), 1668–1676. <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/m00x7j32>